

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat adalah peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan etika. Pada mulanya tidak banyak perusahaan apalagi di Indonesia yang memperhatikan hal tersebut. Umumnya perusahaan masih berfokus pada aspek finansial atau ekonomis untuk menunjukkan keberhasilannya, namun perusahaan-perusahaan seluruh dunia kini sudah memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial dalam menjalankan operasi bisnis mereka untuk mempertahankan diri terhadap tekanan sosial melalui pengembangan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

Manajemen mungkin tidak menyadari bahwa perusahaan adalah bagian dari komunitas, dan agar perusahaan dapat bertahan hidup, komunitas harus menjadi tempat yang sehat untuk hidup dan bekerja, serta bahwa orang-orang membutuhkan jaminan keuangan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan dengan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial maka perusahaan dapat membina

hubungan yang baik dengan masyarakat dan secara langsung akan menguntungkan bagi perusahaan dalam jangka panjang.

*Corporate Sosial Responsibility* atau yang dikenal dengan CSR adalah sebuah program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas, dimana tanggung jawab sosial perusahaan ini hendaknya dilakukan secara sukarela (*volunteer*) oleh perusahaan, bukan sebagai kewajiban. Selain itu, implementasi CSR sendiri adalah sebuah program yang tidak mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*).

Menyadari hal diatas sebagai salah satu implementasi CSR, pada tanggal 17 Juni 2003 pemerintah melalui Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: 236/ MBU/ 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL), yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang mengatur kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN. Dalam hal ini BUMN ditunjuk sebagai pelaksana program kemitraan dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan penghasil barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat dan memiliki

peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi berskala kecil.

Program-program PKBL terdiri dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk program kemitraan sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih perusahaan. Program kemitraan memiliki sasaran yaitu usaha kecil dan menengah serta koperasi di sekitar lokasi perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan. Dengan prioritas utamanya adalah usaha kecil perorangan/ badan usaha dan koperasi yang belum atau tidak mempunyai jaminan cukup untuk memperoleh kredit bank dan memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau omset maksimum Rp 1.000.0000.000 (satu milyar rupiah) dalam setahun.

Program bina lingkungan yaitu program yang memberdayakan kondisi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, melalui pemanfaatan dana dari perusahaan setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen), hal ini sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa kepelabuhanan di wilayah Jambi juga bertugas sebagai pelaksana Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang diamanatkan Pemerintah selaku Pemegang Saham melalui Kementerian BUMN.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada suatu periode, sangat dibutuhkan indikator kinerja yang jelas. Indikator kinerja tersebut adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Meskipun manajemen perusahaan telah memiliki tata cara pelaksanaan PKBL yang baik dan benar, namun masih memungkinkan terdapat kesenjangan antara praktik yang terjadi dengan konsep ideal yang seharusnya diterapkan.

Oleh karena itu, Evaluasi Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan hal yang harus dilakukan manajemen perusahaan sebagai bahan untuk menilai implementasi strategi yang lampau, serta bahan penetapan strategi yang akan datang.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih topik dengan judul *“Evaluasi Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ditinjau dari Aspek Keuangan PKBL pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi”*.

## **1.2 Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Wujud pelaksanaan kewajiban PT Pelabuhan Indonesia II adalah dengan melaksanakan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Pelaksanaan dari program tersebut didelegasikan ke masing-masing unit PKBL Cabang Pelabuhan di berbagai Propinsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam praktiknya dimungkinkan terjadinya kesenjangan antara pelaksanaan yang ideal dibandingkan faktual dilapangan. Hal tersebut, bisa disebabkan karena faktor pengawasan yang kurang ketat, ataupun karena staf PKBL di suatu cabang pelabuhan belum melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan secara benar. Jika kesenjangan ini terus terjadi, akan sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan karena kinerja PKBL merupakan salah satu cerminan tingkat kesehatan suatu BUMN.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Pelabuhan Indonesia II, maka dalam hal ini penulis melakukan pembatasan masalah yaitu menghitung tingkat efektifitas dan kolektibilitas atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pelindo II di Cabang Jambi pada periode dua tahun terakhir (2010 – 2011) ditinjau dari aspek keuangannya.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana tingkat efektivitas dan kolektibilitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ditinjau dari aspek keuangan cabang Jambi PT Pelindo II pada tahun 2010 dan tahun 2011?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah :**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) khususnya di Cabang Jambi dilihat dari aspek keuangan.

2. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja PKBL ditinjau dari aspek keuangan PKBL PT Pelindo II (Persero) Cabang Jambi sesuai dengan SK Menteri BUMN Nomor : KEP.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh mitra PKBL atas pelaksanaan PKBL PT Pelindo II Cabang Jambi.

### **1.3.2 Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :**

1. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi
2. Penelitian yang dilakukan penulis dapat dijadikan masukan bagi perusahaan dalam memperbaiki kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi
3. Penelitian ini menjadi masukan, referensi, dan informasi tambahan bagi penelitian lain yang berhubungan dengan Evaluasi Kinerja Perusahaan.